

AGLOMERASI DAN PENGARUH ALIRAN DANA SEKTOR MONETER PADA PERTUMBUHAN SEKTOR RIIL DI WILAYAH CILACAP – BANYUMAS DAN SEKITARNYA

Oleh:
Kamio¹⁾ dan Abdul Aziz Ahmad ²⁾

¹⁾ Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman

²⁾ Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman

ABSTRACT

The determining Cilacap District as an economic core area of southwest Central Java should be assisted in such a way so as to be able to significantly accelerate the growth of the regions and whole of the south area. Based on the region potential mapping, this research found that the real sector activities in Cilacap was more dominance than the other district in south area. So were the financial activities, flow of loan to manufacturing sector in Cilacap also dominance compared to the other regions. From human development side, Cilacap, as indicated by rising Human Development Index and higher rate of income per capita of most of the inhabitant, had a better condition than other region. The main obstacle to develop industrial area in the region was lack and low quality of infrastructure. Inexpediently condition of road and lack of effort to improve the infrastructure would impede new investment. According to parameter of causality relationship between real and financial sector of the region, advancement of real sector was supported by productive financially sector. High loan to deposit ratio in the region will encourage regional development and economic growth, especially as long as non-consumptive loan had been improved, it would push the manufacturing industris growth up.

Keywords: economic core area, region potential mapping, infrastructure, human quality, own source revenue

PENDAHULUAN

Semenjak era reformasi 1998, kebijakan ekonomi diarahkan pada pola kebijakan pembangunan daerah. Sebagaimana didefinisikan oleh Smith (1985 : 8-12) bahwa desentralisasi mencakup beberapa elemen. Pertama, desentralisasi memerlukan pembatasan area, yang bisa didasarkan pada tiga hal, yaitu pola spasial kehidupan sosial dan ekonomi, rasa identitas politik dan efisiensi pelayanan publik yang bisa dilaksanakan. Kedua, desentralisasi meliputi pula pendelegasian wewenang, baik itu kewenangan politik maupun kewenangan birokratik. Dengan demikian, otonomi daerah membuka peluang yang makin luas bagi daerah untuk merencanakan pembangunan berbasis kemampuan dan kebutuhan daerah sendiri.

Arsyad (1999) menekankan bahwa perbedaan kondisi daerah membawa implikasi terhadap corak pembangunan yang diterapkan. Kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang ditetapkan di suatu daerah harus disesuaikan dengan kondisi (masalah, kebutuhan dan potensi) daerah yang bersangkutan.

Satu program khusus untuk mendorong kemajuan ekonomi wilayah adalah upaya untuk mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Kawasan ini, selain ditujukan untuk mendorong pertumbuhan wilayah, juga diharapkan dapat menarik penanaman modal ke wilayah-wilayah itu. Dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus, diharapkan akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat di sekitarnya. Komitmen daerah untuk memangkas birokrasinya, menghilangkan pungutan-pungutan yang membebani kegiatan usaha, menyediakan dan mengamankan lahan yang sesuai serta dukungan penuh dari Pemerintah Daerah, merupakan kunci keberhasilan Kawasan Ekonomi Khusus (Yudhoyono, 2006). Lebih lanjut, pembentukan KEK diharapkan akan mampu menyerap tenaga kerja langsung maupun tidak langsung, peningkatan penerimaan devisa, meningkatkan keunggulan kompetitif produk ekspor, meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal, pelayanan dan kapital bagi peningkatan ekspor. KEK diharapkan akan mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di kawasan tersebut.

Sebagai upaya peningkatan investasi, ekspor dan percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah telah mengeluarkan Inpres No. 3/2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi dan SK Menko Perekonomian No. KEP-08/M.EKON/02/2006 (17 Februari 2006) tentang Paket Kebijakan Infrastruktur. Namun seiring dengan perkembangan ekonomi global, Indonesia

perlu memfokuskan peningkatan ekspor dan investasinya pada beberapa kawasan khusus. Kawasan khusus inilah yang akan dikembangkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia (KEKI).

Di Propinsi Jawa Tengah, salah satu upaya untuk mendorong pembangunan di wilayah Selatan Jawa Tengah adalah upaya untuk menjadikan Kabupaten Cilacap sebagai kawasan industri selatan Jawa Tengah. Kabupaten Cilacap dengan tersedianya infrastruktur pelabuhan yang ada dipandang akan dapat memberikan kemudahan wilayah Cilacap dan sekitarnya dalam ekspor impor.

Pembangunan wilayah selatan Jawa Tengah perlu dipikirkan terkait dengan ketidakseimbangan pembangunan antara wilayah selatan dan wilayah utara Jawa Tengah. Kendala moda transportasi karena faktor geografis antara wilayah selatan Jawa Tengah dengan pusat pertumbuhan ekonomi Semarang menyebabkan wilayah selatan jauh tertinggal terutama dalam pembangunan sektor manufaktur.

Perencanaan wilayah Cilacap dan sekitarnya sebagai area kawasan ekonomi kawasan selatan Jawa Tengah tidak hanya akan memberikan keuntungan bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi Cilacap sendiri. Kawasan *peripheri* atau wilayah sekitarnya juga diprediksi akan terkena dampak positifnya. Wilayah pinggiran ini sekaligus akan menjadi daerah penyangga dalam memasok kebutuhan sumber daya atau input industri sekaligus menjadi pasar dari output industri di wilayah inti. Sektor pertanian juga akan menerima dampak positifnya berupa meningkatnya permintaan bahan baku dari industri pengolahan hasil-hasil pertanian. Proses aglomerasi kawasan akan tercipta jika hubungan saling menguntungkan tersebut dapat terjadi.

Kabupaten Cilacap diperkirakan dapat dianggap sebagai wilayah terdekat dalam moda pengangkutan. Kabupaten Banyumas dengan ibukotanya di Purwokerto merupakan pusat pelayanan lokal dan aktivitas di sektor penyedia jasa terutama sektor di perbankan, sementara daerah sekitar merupakan daerah pendukung. Misalnya, kabupaten Purbalingga merupakan daerah dengan potensi tumbuh kembang di sektor industri kreatif dan Kebumen sebagai pemasok tenaga kerja. Wilayah sekitar tersebut akan memperoleh manfaat penting karena fungsinya sebagai daerah penyangga.

Untuk mengidentifikasi seberapa jauh potensi aglomerasi yang dapat diciptakan di wilayah Cilacap dan sekitarnya, perlu identifikasi ketersediaan *endowment* daerah dan berjalannya aliran sektor moneter yang mampu menggerakkan sektor riil. *Endowment* aglomerasi daerah tersebut dapat diartikan sebagai daya dukung dan potensi daerah untuk pengembangan sektor modern. Indikator aglomerasi wilayah inti adalah kontribusi dan pertumbuhan sektor modern yang lebih tinggi

daripada sektor tradisional dan berperannya sektor perbankan dalam menyuplai kebutuhan dana pembangunan sektor riil. Dengan demikian, penelitian ini akan berupaya untuk mendeteksi bagaimana kontribusi aliran sektor moneter pada pertumbuhan sektor-sektor riil pada wilayah sasaran dan mengidentifikasi faktor daya dukung apa saja yang mampu memberikan peran optimal untuk percepatan aglomerasi daerah sasaran.

Aglomerasi sendiri merujuk pada *clustering* perusahaan-perusahaan di lokasi tertentu di suatu daerah perkotaan. Manfaat dari ekonomi aglomerasi dan peran dari pertumbuhan perkotaan pertama kali diperkenalkan oleh teori Marshall. Ia memberikan argumentasi bahwa kegiatan ekonomi eksternal seperti *pooling* pasar tenaga kerja, *input sharing* dan *technological spillover* yang mendorong level produktivitas suatu kota akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Glaeser (1992) menunjukkan terdapat bukti-bukti empiris dari hal tersebut. Demikian pula Hanson (1996) telah mendukung teori Marshall tersebut.

Pentingnya aglomerasi terkait pula dengan meningkatnya pangsa penjualan yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan di suatu wilayah terhadap wilayah lainnya. Aglomerasi juga akan memberikan keterkaitan penting antara daerah pusat (*core*) dengan daerah sekitar. Jika ukuran perusahaan di wilayah *core* meningkat maka permintaan input faktor akan meningkat (Ottaviano dan Puga, 1997). Terutama jika input tersebut dapat disediakan oleh daerah pusat atau daerah sekitar. Salah satu faktor pendorongnya adalah biaya transportasi yang lebih rendah jika input diperoleh dari wilayah yang relatif lebih dekat dengan pusat industri.

Pembentukan kawasan ekonomi khusus di Jawa Tengah pada penelitian ini dilihat sebagai proses pembentukan aglomerasi di wilayah tertentu. KEK di wilayah ini merupakan perencanaan kebijakan untuk menentukan suatu daerah menjadi pusat ekonomi dengan fokus pada sektor industri. Dampak adanya KEK ini bukan hanya akan memberikan manfaat positif bagi perkembangan ekonomi daerah utama (KEK), tetapi juga akan memberikan stimulasi positif meningkatnya aktivitas ekonomi daerah sekitar KEK. Daerah koridor KEK ini terutama diproyeksikan sebagai daerah penyangga untuk menyediakan input bagi daerah kawasan khusus.

Beberapa Penelitian terdahulu yang membahas bagaimana pentingnya aglomerasi regional di antaranya adalah:

1. Robert-Nicoud, F. (2006), dengan berbasis pada teori Ekonomi Geografi Baru atau *New Economic Geography*, meneliti mengenai fenomena aglomerasi dan menyatakan bahwa aglomerasi bermanfaat bagi setiap penduduk wilayah di area tersebut, menyediakan kaitan vertikal antar industri

yang penting bagi penurunan harga produsen dan menurunkan halangan perdagangan.

2. Rawat, A, (2009) peneliti dari Universitas Bangalore membuktikan bahwa aglomerasi pada kasus di Bangalore telah menjadi aglomerasi yang lebih luas dengan keterkaitan yang kuat antara sektor industri dengan sektor pendidikan (universitas).
3. Carvajal dan Watanabe (2004) meneliti pola klaster sektor manufaktur di Jepang. Hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa aglomerasi telah menjadi sumber dinamika perekonomian Jepang dan memajukan pembangunan ekonomi regional.
4. Fan dan Scot pada tahun 2003 menunjukkan untuk kasus di Asia Timur dan China bahwa aglomerasi spasial memiliki korelasi positif dan kuat dengan produktivitas sektor-sektor ekonomi, khususnya sektor dan wilayah yang menjalankan tingkat liberalisasi lebih intensif.

Penelitian ini penting mengingat kawasan selatan relatif tertinggal dalam persaingan industri dengan kawasan utara (Kamio dan Aziz, 2009). Adanya penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi identifikasi potensi pengembangan aglomerasi kawasan selatan Jawa Tengah sekaligus menilai apakah keterkaitan antara sektor moneter dengan sektor riil berjalan dengan optimal di wilayah ini.

Dari latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengukur kontribusi sumber daya lokal dalam pengembangan kawasan Cilacap dan Banyumas untuk tujuan aglomerasi
2. Memetakan ketersediaan faktor *endowment* di kawasan Cilacap dan Banyumas untuk tujuan aglomerasi.
3. Mengukur determinan-determinan daya dukung sektor perbankan pada pertumbuhan sektor riil di kawasan Cilacap dan Banyumas selama periode pengamatan.

METODE PENELITIAN

1. Materi Data dan Metode Pengumpulannya

Data penelitian berasal dari data sekunder. Data sekunder yang digunakan berupa literatur dan data yang telah tersedia di lembaga pemerintah. Data sekunder dipergunakan untuk menyusun identifikasi faktor pendukung aglomerasi, pembuatan analisis basis ekonomi dan permodelan kausalitas. Identifikasi faktor pendukung aglomerasi memerlukan data di lintas kabupaten yaitu kabupaten Banyumas, Cilacap dan sekitarnya. Data untuk analisis basis ekonomi menggunakan data *cross section* dari 35 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah. Data untuk analisis kausalitas bersifat data lintas ruang (*cross section data*) dengan

rentang data horizontal meliputi daerah-daerah kabupaten /kota wilayah sasaran.

2. Metode Analisis 1: Analisis Deskriptif

Wilayah aglomerasi potensial dapat dijelaskan secara kualitatif dengan: Pertama, mengobservasi faktor daya dukung wilayah dalam faktor sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan. Untuk itu, pemetaan kapasitas sumber daya di wilayah penelitian akan dilakukan pada penelitian ini

Kedua, mengobservasi pangsa ekonomi sektoral dengan membuat rasio antara nilai tambah setiap sektor ekonomi terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Pada penelitian ini perlu dilakukan penghitungan rasio nilai tambah sektor modern dan sektor tradisional beserta pertumbuhannya

Ketiga, mengobservasi besaran-besaran moneter wilayah. Besarnya nilai penyaluran kredit beserta nilai LDR di suatu daerah dapat dipergunakan untuk mendeteksi seberapa besar potensi daerah itu dipercaya oleh sektor perbankan dalam pengembangan sektor riil.

3. Metode Analisis 2: Basis Ekonomi

Untuk mengidentifikasi subsektor-subsektor unggulan atau ekonomi basis dari wilayah Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Tengah akan digunakan alat analisis *Location Quotients*. Formula yang digunakan untuk analisis *Location Quotient* (SLQ) adalah sebagai berikut (Wagner, 2000);

$$LQ = \frac{e_{si}/e_i}{e_s/e}$$

di mana;

$e_{s,i}$ = nilai produksi subsektor s pada daerah kabupaten/kota

e_i = total PDRB kabupaten/kota

e_s = nilai produksi sektor s pada wilayah Jawa Tengah

e = total PDRB wilayah Jawa Tengah

Jika suatu subsektor ekonomi memiliki nilai $LQ > 1$ dapat dikatakan bahwa subsektor tersebut merupakan subsektor unggulan dari daerah kota/kabupaten. Sebaliknya jika $LQ < 1$, subsektor tersebut bukan merupakan sub sektor unggulan.

4. Metode Analisis 3: Kausalitas Kontribusi Sektor Moneter – Pertumbuhan Sektor Riil

Pada penelitian ini, model yang dipergunakan untuk menjelaskan kaitan antara variabel tergantung dengan variabel-variabel tak tergantung yang terkait dengan variasi akan dipilih model ekonometri yang terbaik sesuai dengan kriteria teoritis dan gambaran hasil observasi.

Data-data dalam penyusunan hubungan kausalitas tersebut menggunakan data sekunder. Untuk variabel dependen, data yang dipergunakan adalah pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan manufaktur pada tahun 2008. Sementara, untuk data independen, data yang digunakan sebagian besar menggunakan data dengan lag 1 tahun. Pertimbangannya, pengaruh dari variabel-variabel tak tergantung ini umumnya tidak terjadi secara segera atau instan, melainkan memerlukan jangka waktu tertentu. Periode lag 1 tahun tersebut diperkirakan cukup tepat mengingat dampak dari pengaruh variabel tak tergantung tersebut tidak terjadi secara spontanitas atau segera.

Model dasar dari model yang dibangun adalah:

$$Y_t = s_0 + s_1 X_{1t} + s_2 X_{2t} + \dots + s_k X_{kt} + v_t$$

Dimana,

Y_t = variabel tergantung,

s_0 = konstanta,

s_1, s_2, \dots, s_k = nilai parameter yang dicari, dan

$X_{1t}, X_{2t}, \dots, X_{kt}$ = variabel tidak tergantung.

Pada penelitian ini, variabel tergantung terklasifikasi menjadi 2 variabel. Pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Variabel pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai proksi potensi aglomerasi, di mana daerah yang perekonomiannya cenderung lebih maju daripada daerah sekitar cenderung akan tumbuh tingkat perekonomiannya lebih tinggi. Tingginya pertumbuhan ekonomi daerah tersebut mencerminkan peningkatan yang tinggi dari aktivitas setiap sektor ekonomi dan sekaligus menarik bagi investasi dan usaha baru.

Variabel tergantung kedua adalah pertumbuhan sektor manufaktur. Pertimbangannya adalah bahwa sektor ekonomi modern cenderung digerakkan oleh sektor-sektor ekonomi sekunder, yaitu manufaktur dan jasa-jasa. Selain itu, ciri-ciri tren daerah yang menjadi pemusatan ekonomi adalah daerah yang memperoleh kontribusi utama bukan dari sektor primer (pertanian dan pertambangan), melainkan dari sektor sekunder dan tersier. Majunya sektor modern ini mencerminkan berkembangnya daerah itu menjadi wilayah pemusatan ekonomi.

Variabel yang memberi dampak penting pada perubahan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut adalah:

1. Aktivitas sektor moneter yang tercermin dari pertumbuhan penghimpunan dana, pertumbuhan penyerapan kredit dan pembiayaan serta rasio antara penyaluran kredit dan penghimpunan dana. Asumsinya, daerah yang pertumbuhan ekonominya tinggi cenderung didorong oleh meningkatnya

perkembangan sektor moneter di daerah itu. Demikian pula tingginya rasio penyaluran kredit dibandingkan penghimpunan dana menunjukkan daerah tersebut menjadi wilayah yang menarik untuk pengembangan usaha di sektor riil

2. Kepadatan penduduk. Variabel ini penting untuk mengukur aglomerasi di mana daerah yang perekonomiannya maju akan menjadi tempat yang menarik bagi pencari kerja dan menimbulkan dampak urbanisasi.
3. Infrastruktur. Daerah yang perekonomiannya maju cenderung didukung oleh kekuatan infrastruktur, di mana kelayakan infrastruktur akan mendorong majunya tingkat transportasi dan komunikasi yang penting bagi akses pengembangan usaha, proses produksi dan pemasaran produk. Pada penelitian ini, proksi dari variabel infrastruktur adalah proporsi jalan raya yang layak dengan kategori jalan raya (total jalan raya) pada kondisi baik dan sedang.
4. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM). Daerah dengan pemusatan ekonomi akan memerlukan kualitas SDM yang baik. Kualitas SDM mencerminkan adanya proses *spill over* dan transfer teknologi yang makin mendorong kemajuan ekonomi daerah. Proksi yang digunakan sebagai variabel SDM ini adalah nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan kualitas SDM.
5. Aktivitas usaha. Wilayah dengan pemusatan ekonomi didukung oleh makin banyaknya sektor usaha yang mengambil manfaat dari pembangunan wilayah. Proksi yang digunakan dalam variabel ini adalah jumlah perusahaan formal yang terdapat di setiap daerah.
6. Pendanaan daerah. Pemanfaatan keuangan daerah yang efektif dapat diduga memberikan kontribusi penting bagi kemajuan daerah. Makin tinggi pertumbuhan ekonomi daerah diduga salah satu faktor penyebabnya adalah efektivitas penggunaan dana daerah untuk memperbaiki dan mendorong kondisi perekonomian. Aspek pendanaan daerah dalam penelitian ini menggunakan proksi pertumbuhan realisasi PAD.

Untuk mendapatkan hasil regresi yang baik digunakan sebagai alat estimasi, perlu dilakukan serangkaian pengujian secara statistik dan ekonometri untuk mengetahui sejauh mana variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi output.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Potensi Sektor Riil

Kawasan Selatan Jawa Tengah, yang keseluruhannya melingkupi daerah-daerah

berbentuk kabupaten, merupakan wilayah yang relatif jauh dari pusat pertumbuhan seperti Kota Semarang dan Surakarta. Wilayah ini tertinggal dalam kemajuan pembangunan terutama di sektor manufaktur dari wilayah utara.

Cilacap merupakan salah satu kabupaten di wilayah selatan Jawa Tengah yang pernah diusulkan untuk menjadi daerah kawasan ekonomi khusus. Daerah ini dipandang memiliki potensi untuk mengangkat pembangunan wilayah selatan, terutama dalam pengembangan kawasan industri.

Pada tahun 2008, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cilacap, tanpa menyertakan pengolahan minyak, mencapai nilai Rp11.689 miliar. Daerah setingkat dengan angka lebih tinggi di Jawa Tengah hanyalah kabupaten Kudus dan Kota Semarang. Dibandingkan dengan wilayah sekitarnya, PDRB Kabupaten Cilacap jauh lebih tinggi. Nilai PDRB Cilacap sekitar 4,3 kali PDRB kabupaten Kebumen dan Purworejo, 2,8 kali PDRB Banyumas. Dibandingkan dengan Kabupaten Purbalingga mencapai 5,1 kali lipat.

Dari sisi pertumbuhan ekonominya, Kabupaten Cilacap relatif lebih rendah daripada daerah sekitar. Pertumbuhan ekonomi Cilacap tahun 2008 sebesar 4,921 persen. Pertumbuhan tahun 2008 tersebut lebih tinggi dari tahun 2006 dan 2007. Di daerah sekitar, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas mencapai 5,4 persen, Kebumen dan Purworejo 5,6 persen dan Purbalingga 5,3 persen.

Khusus di sektor manufaktur sebagai penggerak perekonomian modern, sektor ini tumbuh di Cilacap pada tahun 2008 sebesar 4,40 persen dengan nilai PDRB sebesar Rp1.686 miliar atau memberikan kontribusi pada PDRB total sebesar 14,13 persen. Dibandingkan dengan wilayah lain di Jawa Tengah, daerah lain dengan nilai PDRB manufaktur yang lebih tinggi daripada kabupaten Cilacap adalah Kabupaten Karanganyar, Kudus, Semarang dan Kota Semarang.

Untuk wilayah sekitarnya Cilacap, manufaktur Banyumas memberikan kontribusi pada PDRB Banyumas sebesar 16,33 persen dengan pertumbuhan 2008 sebesar 3,33 persen. Sementara, manufaktur Kabupaten Kebumen tumbuh 4,24 persen dengan kontribusi pada PDRB daerah sebesar 9,84 persen.

Perkembangan manufaktur Cilacap memperlihatkan tren positif. Di wilayah selatan lain, Purworejo menunjukkan tren peningkatan pertumbuhan tertinggi, tetapi dari besaran nilainya, PDRB industri manufaktur Purworejo lebih rendah dari Cilacap, Banyumas maupun Kebumen. Pada tahun 2008, pertumbuhan manufaktur 2008 di wilayah selatan Jawa Tengah lebih rendah daripada pertumbuhan manufaktur 2007.

2. Potensi Sektor Keuangan

Dari sisi aktivitas sektor moneter, penghimpunan dan penyaluran dana Kabupaten Banyumas lebih tinggi daripada Kabupaten Cilacap maupun kawasan selatan Jawa Tengah lainnya pada 2008. Penghimpunan dana perbankan di Banyumas mencapai Rp3.571 miliar. Untuk Cilacap sebesar Rp2.883 miliar, Purbalingga Rp952 miliar, Kebumen Rp1.336 miliar dan Purworejo sebesar Rp1.209 miliar. Walaupun demikian, tren pertumbuhan penghimpunan dana di Cilacap tahun 2008 cenderung lebih tinggi daripada Kabupaten Banyumas, dimana Banyumas sebesar 10,36 persen sedangkan Cilacap sebesar 17,09 persen.

Pada sisi penyaluran dana sektor perbankan, total kredit yang diberikan di Cilacap sebesar Rp2.342 miliar sedangkan di Banyumas Rp3.518 miliar. Meskipun demikian, proporsi pola tujuan penggunaan kredit Cilacap untuk tujuan non konsumtif lebih tinggi daripada daerah lain di wilayah selatan. Di Cilacap, pada 2008 kredit yang diperuntukkan untuk aktivitas produktif, yaitu untuk penggunaan modal kerja dan investasi, sebesar 55 persen dari total kredit perbankan. Di Banyumas sebesar 49,5 persen, Purbalingga 53,1 persen, Kebumen 48,0 persen dan Purworejo 46,08 persen.

Tahun 2008, rasio antar penghimpunan dan penyaluran dana (*Loan to Deposit Ratio*) Cilacap tidak tergolong tinggi, sebesar 0,81. Sementara LDR di Purbalingga mencapai lebih dari 1 yang menunjukkan penyerapan kredit dari sektor perbankan oleh sektor riil di Purbalingga lebih aktif daripada wilayah selatan lainnya.

Dari gambaran tersebut, Kabupaten Banyumas dengan pemusatan ekonomi di Purwokerto dapat dianggap sebagai *Core* perbankan di wilayah selatan Jawa Tengah. Sementara, dengan kondisi kontribusi dan perkembangan manufaktur yang lebih baik di Cilacap daripada di wilayah sekitarnya, dapat diduga terjadi transfer kredit dari area Banyumas ke wilayah sekitarnya, termasuk Cilacap. Karena aktivitas sektor riil di Cilacap dapat dibiayai dari wilayah sekitar Cilacap, terdapat pola spesifik dimana pusat pengembangan manufaktur di wilayah selatan (Cilacap) cenderung memperoleh insentif sektor moneter dari daerah dengan konsentrasi moneter yang lebih tinggi, seperti Banyumas.

3. Pendapatan Daerah

Pada tahun 2008, nilai PAD Cilacap melampaui PAD daerah sekitarnya. PAD Cilacap sebesar Rp102 miliar, sementara di Banyumas sebesar Rp89 miliar, Purbalingga Rp63 miliar, Kebumen Rp58 miliar dan Purworejo Rp42 miliar. Dari sisi tren perkembangannya, PAD Cilacap dan Purbalingga menunjukkan pertumbuhan positif,

sementara tren PAD Banyumas, Kebumen dan Purworejo cenderung menurun.

Dari sisi perolehan PAD bersumber pajak daerah, besaran pajak daerah Cilacap tahun 2008 mencapai Rp41,10 miliar, sementara Banyumas Rp17,22 miliar, Purbalingga Rp9,57 miliar, Kebumen Rp10,98 miliar dan Purworejo Rp6,17 miliar. Untuk nilai retribusi daerah tahun 2008, retribusi daerah di Kabupaten Cilacap sebesar Rp40,01 miliar, Banyumas Rp55,84 miliar, Purbalingga Rp37,43 miliar, Kebumen Rp26,65 miliar dan Purworejo Rp30,84 miliar. Dari pertumbuhannya, nilai pajak dan retribusi Kabupaten Cilacap makin menguat pada rentang 2006 – 2008.

4. Potensi Sumber Daya Manusia

Potensi kependudukan Cilacap lebih tinggi daripada wilayah sekitar. Cilacap lebih unggul dari daerah sekitar bukan hanya ditunjukkan oleh lebih banyaknya jumlah penduduk tetapi juga dari hasil perkembangan hasil pembangunan sumber daya manusia (SDM)nya. Jumlah penduduk Cilacap tahun 2008 sebesar 1,63 juta jiwa. Sementara Banyumas sebesar 1,50 juta, Purbalingga 0,83 juta, Kebumen 1,22 juta dan Purworejo 0,72 juta jiwa.

Dari perkembangan pembangunan SDMnya tercatat daerah paling potensial dalam pengembangan SDM adalah Cilacap dan Purbalingga. Ukuran pembangunan SDM ini adalah nilai dari IPM (Indeks Pembangunan manusia). Dari pemetaan daerah dengan menggunakan metode tipologi daerah yang mengaitkan antara kondisi perekonomian dan hasil pembangunan SDM, diketahui untuk Cilacap pertumbuhan ekonominya 5,34 persen per tahun (dari 2005 – 2008) dengan pertumbuhan IPMnya sebesar 1,03 persen per tahun. Sementara untuk Banyumas pertumbuhan ekonomi tahunannya 4,62 persen dan pertumbuhan IPMnya 0,88 persen, Banjarnegara masing-masing 5,60 persen dan 1,12 persen, Kebumen 4,64 persen dan 0,88 persen, sementara untuk Purworejo sebesar 5,90 persen dan 0,88 persen. Kondisi ini menempatkan Kabupaten Cilacap dan Purbalingga merupakan daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi yang sekaligus pertumbuhan IPMnya tinggi.

Dari sisi pendapatan per kapita, Cilacap merupakan daerah paling maju daripada kawasan selatan Jawa Tengah lainnya. Tahun 2008, pendapatan per kapita Cilacap mencapai Rp7,19 juta, Banyumas Rp2,78 juta, Purbalingga Rp2,73 juta, Kebumen Rp2,23 dan Purworejo Rp3,79 juta. Meskipun PMnya relatif lebih rendah daripada Banyumas, Purbalingga dan Purworejo, dengan pertumbuhan IPM yang tinggi dan kondisi pendapatan per kapita tinggi, Cilacap cukup potensial menjadi pemusatan aktivitas ekonomi.

5. Kondisi Infrastruktur

Infrastruktur jalan raya 2008 di Cilacap relatif paling buruk daripada wilayah Selatan Jawa Tengah. Dari total jalan raya sepanjang 1.965 km, jalan raya dengan kategori layak (baik dan sedang) sebanyak 39,90 persen. Sementara untuk wilayah sekitarnya, kondisi jalan layak di Banyumas meliputi 42,66 persen dari panjang jalannya, Purbalingga 44,02 persen, Kebumen 43,30 persen dan Purworejo 41,11 persen. Sementara dari perkembangannya, Cilacap dan kawasan sekitarnya memperlihatkan tren penurunan kualitas infrastruktur jalan raya. Kondisi rendahnya kelayakan jalan raya ini mencerminkan tingginya kendala infrastruktur dalam pembangunan kawasan selatan Jawa Tengah, khususnya di Cilacap.

Infrastruktur lain yang telah menjadi nilai tambah Cilacap daripada daerah sekitarnya adalah ketersediaan pelabuhan laut dan pelabuhan udara. Adanya pelabuhan laut dengan intensitas bongkat muat yang cukup tinggi di Cilacap menunjukkan adanya potensi untuk pengembangan industri pengolahan wilayah sekitarnya. Sampai 2008, aktivitas pelayaran di pelabuhan Cilacap didominasi oleh pengangkutan minyak dan hasil tambang lainnya.

Untuk aktivitas pelabuhan udara, Cilacap relatif menunjukkan kemunduran. Walaupun tersedia pelabuhan udara di Cilacap, terdapat indikator kendala penting dalam pengelolaan infrastruktur penerbangan Cilacap. Tabel 1 berikut menunjukkan intensitas aktivitas penerbangan di Pelabuhan Tunggul Wulung Cilacap yang makin menurun.

6. Basis Ekonomi Manufaktur

Sektor manufaktur yang merupakan sektor pendorong aglomerasi perlu dilihat kekuatan relatifnya. Identifikasi nilai Location Quotient (LQ) manufaktur cukup memberikan indikator apakah manufaktur di Cilacap, dan sekitarnya, memiliki potensi yang lebih tinggi untuk dikembangkan daripada sektor ekonomi lainnya.

Jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain se Jawa Tengah, nilai LQ manufaktur tahun 2008 untuk kawasan selatan Jawa Tengah relatif rendah, atau kurang dari 1. nilai ini menunjukkan potensi yang rendah dalam pengembangan manufaktur. Grafik 1 memperlihatkan seluruh daerah di kawasan Selatan tidak memiliki basis manufaktur kuat dengan LQ kurang dari 1. Untuk seluruh daerah di Jawa Tengah, daerah-daerah dengan nilai LQ lebih dari 1 adalah: Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar, Kudus, Jepara, Kendal, Batang, Pekalongan, Tegal, Kota Surakarta dan Kota Semarang

Dengan pembandingan daerah-daerah di Jawa Tengah, nilai LQ Cilacap lebih rendah daripada Banyumas. Meskipun demikian, perkembangan

tahunannya menunjukkan pola berbeda. Tren LQ di Cilacap menunjukkan pertumbuhan sementara di Banyumas trennya cenderung menurun.

Dari simulasi yang berbeda, dengan pembandingnya adalah daerah-daerah di kawasan selatan Jawa tengah, hasil perhitungan LQ menunjukkan Banyumas dan Cilacap memiliki potensi yang lebih tinggi dalam pengembangan manufaktur daripada wilayah Purbalingga, Kebumen dan Purworejo. Pada tahun terakhir observasi, 2008, Nilai LQ Banyumas tertinggi di kawasan dengan LQ 1,23, Cilacap 1,08. Sementara nilai LQ wilayah lain lebih rendah. Nilai LQ ini menunjukkan pengembangan kawasan industri memiliki potensi di Banyumas dan Cilacap dari pada wilayah selatan lainnya.

Dari perkembangannya, LQ Cilacap menurun dari 2005 sampai 2007 dan kembali meningkat 2008. Sementara LQ Banyumas menunjukkan tren menurun sejak 2005 sampai 2008. Tren positif dari LQ Cilacap menjadi indikator pengembangan manufaktur di Cilacap lebih memiliki potensi untuk lebih maju daripada Banyumas.

7. Analisis Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi dengan Sektor Moneter dan pendorong Aglomerasi

Pada bagian ini, analisis kausalitas mengambil data cross section daerah kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2008. Analisis kausalitas ini terbagi dalam beberapa simulasi untuk menunjukkan pengaruh tunggal dan pengaruh serempak.

Pada model 1 dalam simulasi pertama (Tabel 1), hubungan kausalitas antara perkembangan aktivitas sektor moneter dan sektor riil menunjukkan korelasi positif dan signifikansi di atas 99%. Hubungan tersebut menunjukkan daerah-daerah di Propinsi Jawa Tengah cenderung memiliki arah pengembangan sektor riil yang sejalan dengan perkembangan positif dari sektor moneter.

Pada model 2, pertumbuhan pembiayaan dari perbankan untuk tujuan produktif mampu mendorong kemajuan sektor riil. Meningkatnya realisasi kredit dari sektor riil untuk tujuan penggunaan modal kerja dan investasi memberikan manfaat positif pada pertumbuhan perekonomian secara keseluruhan. Hasil ini juga menunjukkan peran sektor moneter pada pengembangan usaha, yang ditunjukkan oleh peningkatan dalam rasio pembiayaan atau kredit dengan penghimpunan dana, mampu memberikan kontribusi dalam perekonomian.

Pada model 3, pertumbuhan manufaktur memiliki hubungan searah dan signifikan di atas 99% dengan pertumbuhan ekonomi. Hubungan positif antar variabel ini menunjukkan sektor manufaktur berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Hasil ini menjadi

indikator bahwa daerah-daerah dengan pertumbuhan manufaktur yang tinggi akan mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Pada simulasi kedua, pertumbuhan ekonomi diduga dipengaruhi oleh perkembangan sektor moneter dan faktor-faktor pendorong akselerasi aglomerasi. Aktivitas sektor moneter didefinisikan sebagai pertumbuhan penghimpunan dana dari sektor perbankan, pertumbuhan realisasi kredit yang disalurkan sektor perbankan dan rasio antara penyaluran kredit dan penghimpunan dana sektor perbankan.

Sementara, faktor pendorong aglomerasi adalah kepadatan penduduk yang mencerminkan daya tarik wilayah dalam mendorong urbanisasi dan migrasi antar daerah, kondisi infrastruktur dengan proksi kondisi jalan raya, pembangunan sumber daya manusia dengan proksi nilai IPM, daya tarik lokasi usaha dengan proksi jumlah perusahaan serta pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli

Daerah (PAD) yang diduga memberikan kontribusi penting untuk mempercepat pembangunan daerah.

Pada tabel 2 untuk model 4, identifikasi awal membuktikan aktivitas perbankan berdampak positif pada aktivitas sektor riil. Pertumbuhan penghimpunan dana di perbankan berpengaruh positif dan signifikan dengan probabilitas kesalahan <1 persen. Sementara penyaluran kredit perbankan (*loan growth*) berpengaruh positif dengan probabilitas kesalahan 12,89 persen.

Pada model 5, diketahui LDR, kondisi infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia memiliki pengaruh penting pada pertumbuhan ekonomi dengan *lag* 1 tahun. Sementara, faktor kepadatan penduduk kurang memberikan dampak penting.

Pada faktor LDR, rasio antara penyaluran kredit dan penghimpunan dana berpengaruh positif dan signifikan dengan *lag* 1 tahun pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti Makin tinggi penyerapan kredit akan efektif mendorong aktivitas pengembangan sektor riil. Daerah pertumbuhan ekonomi lebih tinggi tinggi dapat diidentifikasi sebagai daerah dengan rasio LDR lebih tinggi.

Proses aglomerasi ditandai dengan perpindahan penduduk dari daerah tertinggal ke wilayah lebih maju. Daerah dengan konsentrasi ekonomi tinggi akan mendorong urbanisasi. Dampaknya adalah *spillover* teknologi, ketersediaan SDM, perkembangan bisnis dan usaha produktif. Pada analisis ini, faktor kepadatan penduduk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan signifikansi 68,43 persen.

Tabel 1. Simulasi Pengaruh Faktor Tunggal pada Pertumbuhan Ekonomi

Variabel Dependen	Pertumbuhan Ekonomi Daerah-daerah di Jawa Tengah 2008					
	Model 1		Model 2		Model 3	
Independen:	Parameter	p-level (r)	Parameter	p-level	Parameter	p-level
LDR (07)	0,029238	0,000000				
Pertumbuhan MK+Inv (08)			0,013991	0,037072		
Pertumbuhan Manufaktur (08)					0,441502	0,004456
N sampel	35		35		35	
F	9,8870	0,0000	4,7097	0,0045	9,2800	0,0045

Tabel 2. Simulasi Pengaruh Faktor-Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi

Variabel Dependen	Pertumbuhan Ekonomi Daerah-daerah di Jawa Tengah 2008					
	Model 4		Model 5		Model 6	
Independen:	Parameter	p-level (r)	Parameter	p-level	Parameter	p-level
Deposit Growth (08)	0,133177	0,000029			0,020747	0,447613
Loan Growt (08)	0,024216	0,128930			0,013248	0,249121
LDR (07)			0,006626	0,045983	0,008142	0,030664
Kepadatan Penduduk (07)			0,000001	0,316651	0,000002	0,221546
Infrastruktur Jalan (07)			0,020489	0,063652	0,025061	0,048118
IPM (07)			0,000362	0,000222		
Jumlah Perusahaan (07)					0,000017	0,584839
Pertumbuhan Realis PAD (07)					0,063836	0,111362
N sampel	35		35		35	
F	42,6710	0,0000	70,6740	0,0000	30,7970	0,0000
Adj R ²	0,7042		0,8884		0,8563	

Pada sisi infrastruktur, pembangunan infrastruktur berpengaruh positif pada pertumbuhan sektor riil dengan signifikansi 93,6 persen. Daerah-daerah di Jawa Tengah menunjukkan adanya tendensi pertumbuhan ekonomi didominasi oleh daerah-daerah dengan kondisi infrastruktur yang lebih baik. Daerah dengan kemajuan sektor riil tersebut ditandai dengan kemudahan akses transportasi yang dapat tercermin dari fasilitas jalan raya yang memadai. Karena sektor bisnis akan lebih tertarik pada daerah dengan ketersediaan infrastruktur memadai, maka perbaikan jalan raya merupakan kondisi mutlak untuk mendorong munculnya minat investasi daerah.

Dari sisi pembangunan sumber daya manusia, daerah-daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi di wilayah Jawa Tengah ditandai dengan tingginya besaran nilai pembangunan sumber daya manusia. Daerah-daerah dengan konsentrasi manufaktur tinggi secara umum merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan sekaligus memiliki besaran kapasitas pembangunan sumber daya manusia yang tinggi pula. Daerah ini antara lain Kota Surakarta, Kota Semarang, kabupaten Sukoharjo, Karanganyar dan Kudus. Karena itu, daerah yang meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi memerlukan penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan yang lebih baik.

Model 6 merupakan perluasan dari model 4 dan model 5 dengan tidak memasukkan faktor IPM karena alasan statistik. Model 6 juga menunjukkan

hubungan positif antara besaran moneter dengan pertumbuhan ekonomi, demikian pula dari sisi kepadatan penduduk dan infrastruktur.

Dengan memasukkan faktor daya tarik lokasi usaha, hasil simulasi menunjukkan adanya hubungan positif antara banyaknya perusahaan formal di daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Meskipun signifikansinya rendah (secara statistik signifikan dengan probabilitas kesalahan 58,5%), parameter positif dari variabel ini cukup mampu menunjukkan adanya nilai tambah dari meningkatnya jumlah perusahaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada faktor pertumbuhan realisasi PAD, faktor ini memiliki dampak positif dengan signifikansi sebesar 88,9 persen. Dari hasil ini, pertumbuhan PAD terbukti memiliki kontribusi positif dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

7. Analisis Kausalitas Pertumbuhan Manufaktur dengan Sektor Moneter dan pendorong Agglomerasi

Pada bagian ini, analisis ditekankan pada faktor pendorong pertumbuhan sektor manufaktur. Penekanan pada manufaktur dengan pertimbangan agglomerasi lebih didorong oleh akumulasi kapital sektor manufaktur. Perkembangan sektor manufaktur akan mendorong munculnya permintaan aktivitas sektor tersier seperti jasa-jasa termasuk dari jasa sektor perbankan. Berkembangnya manufaktur juga mendorong tumbuhnya potensi pendirian usaha

baru karena aspek daya tarik lokasi yang tercipta karena peran manufaktur.

Pada model 1, kepadatan Penduduk teridentifikasi memiliki dampak penting pada konsentrasi manufaktur. Hasil ini sesuai dengan pengaruh kepadatan penduduk pada pertumbuhan ekonomi dengan dampak yang lebih penting (signifikan) pada pertumbuhan manufaktur.

Jika dibandingkan signifikansi antara variabel kepadatan penduduk ini lebih tinggi pada pertumbuhan manufaktur dibandingkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari model sebelumnya. Hal ini membuktikan manufaktur memiliki cenderung daya tarik lokasi yang lebih tinggi daripada daya tarik sektor ekonomi pada umumnya. Dengan demikian dapat diduga terjadi hubungan simultan antara kepadatan penduduk dengan proses aglomerasi.

Pada model 2, faktor pendapatan per kapita memiliki korelasi positif dan signifikan pada aglomerasi sektor modern (manufaktur). Makin tinggi pendapatan masyarakat akan mendorong akumulasi sektor manufaktur.

Karena pendidikan berkorelasi positif dengan tingkat pendapatan, daerah dengan pendapatan per kapita tinggi akan lebih menarik bagi aktivitas usaha modern. Kualitas pendidikan tinggi akan mendorong ketersediaan SDM sebagaimana lebih diminta sektor bisnis. Dari sudut pandang ini, dapat diduga terjadi hubungan timbal balik antara proses aglomerasi dengan kemajuan kualitas ekonomi masyarakat.

Pada variabel PAD, pertumbuhan PAD memiliki korelasi negatif pada pertumbuhan sektor manufaktur tetapi tidak cukup signifikan. Kondisi ini menunjukkan PAD tidak cukup mampu untuk mendorong aktivitas manufaktur dan mengindikasikan pemanfaatan PAD di wilayah penelitian tidak memberikan kontribusi yang cukup penting bagi pengembangan sektor modern.

Pada variabel kredit perbankan untuk aktivitas produktif yaitu modal kerja dan investasi (Loan-produktif (Ln) 07) memiliki korelasi positif dan signifikan pada sektor manufaktur. Daerah dengan konsentrasi manufaktur tinggi cenderung lebih memanfaatkan aktivitas sektor moneter untuk tujuan produktif, bukan konsumtif.

Untuk variabel moneter kedua, rasio pinjaman dengan deposito (LDR) memiliki korelasi positif dan signifikan pada sektor manufaktur. Hal ini mengindikasikan pertumbuhan sektor riil benar-benar memerlukan dukungan sektor moneter yang efektif. Banyaknya tabungan maupun kredit tidak cukup mampu mendorong pertumbuhan aktivitas sektor riil kecuali sektor moneter berjalan lebih efektif yang ditandai dengan LDR yang lebih tinggi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil analisis, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Cilacap memiliki potensi dalam sebagai pusat perkembangan wilayah Selatan Jawa Tengah. Hal ini teridentifikasi dari kapasitas pengembangan wilayah dengan implikasi pendapatan per kapita yang tinggi, nilai tambah sektor manufaktur yang tinggi, maupun potensi *endowment* yang telah tersedia seperti pelabuhan laut dan udara.
2. Pemetaan potensi menunjukkan aktivitas sektor riil manufaktur Cilacap lebih dominan daripada wilayah sekitarnya
3. Dari sisi aktivitas moneter di kawasan Selatan Jawa Tengah, pinjaman untuk sektor manufaktur didominasi oleh wilayah Cilacap
4. Dari sisi Sumber daya Manusia, wilayah Cilacap memiliki sisi positif bagi pengembangan wilayah yang teridentifikasi dari besarnya jumlah penduduk, pertumbuhan kapasitas hasil pembangunan SDM serta pendapatan per kapita yang tinggi.

Tabel 3. Simulasi Pengaruh Faktor-Faktor Pendorong Pertumbuhan Manufaktur

Variabel dependen: Pertumbuhan Sektor Manufaktur				
Independen:	Model 1		Model 2	
	Pertumbuhan Manufaktur		Proporsi Manufaktur	
	Parameter	p-level (r)	Parameter	p-level (r)
Intersep			-0,776912	0,048077
Kepadatan penduduk	0,000015	0,030876		
Pen per kapita			0,000000	0,013678
Pertumbuhan PAD			-0,029718	0,743434
Loan-produktif (Ln) 07			0,059602	0,061189
LDR_07			0,061773	0,026605
N sampel	35		35	
F	5,0725	0,0309	13,2210	0,0000
Adj R ²	0,1042		0,5898	

5. Kendala utama pengembangan kawasan industri wilayah selatan Jawa Tengah adalah masalah infrastruktur. Tingginya kerusakan infrastruktur transportasi jalan raya Cilacap dan upaya perbaikannya sepanjang tahun menjadi hambatan investasi baru di wilayah itu.

Saran rekomendasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendorong terciptanya aglomerasi kawasan Selatan dengan Cilacap sebagai core aglomerasi, Cilacap perlu menekankan prioritas pada pengembangan manufaktur.
2. Infrastruktur memiliki peran vital untuk menarik modal dan investasi ke daerah. Tingginya tingkat kerusakan jalan raya di Cilacap merupakan kendala bisnis yang mutlak untuk diatasi. Demikian pula, perlu upaya untuk mengatasi rendahnya tingkat penerbangan di Cilacap untuk mendorong kemudahan akses komunikasi bisnis dari pusat pertumbuhan utama di Jawa (Jakarta, Semarang dan Surabaya). Penanaman modal dan perluasan bisnis di Cilacap tidak akan mudah terealisasi tanpa dukungan kecukupan dan kelayakan infrastruktur.
3. Kawasan pertumbuhan di wilayah Selatan dapat direncanakan dengan pengembangan aglomerasi di kawasan Cilacap dengan dukungan aktivitas moneter dari kawasan Banyumas.
4. Perbankan didorong untuk lebih mempermudah dan memprioritaskan pemberian kredit pada aktivitas produktif (modal kerja dan investasi).

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, L. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah (edisi pertama)*. BPF. Yogyakarta.

Aziz dan Kamio, 2009, "Ketimpangan Potensi Manufaktur Antara Wilayah Utara dan Selatan di Propinsi Jawa Tengah (2006 – 2007)", *EKO-REGIONAL Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah* Vol.4, No.2, September 2009

Carvajal, C. and Watanabe, C., 2004, "Clustering Patterns in The Manufacturing Sectors of Japan", *Journal of Technology Innovation* 12, 2 (2004)

Dahl, Michel S., 2001. *Overview of The Histories of Geographical Clustering and Agglomeration*, prepared for the DRUID Winter Seminar in Korsor, Denmark,

Departemen Pekerjaan Umum, 2006, *Berita Penataan Ruang*, Direktorat Jenderal Penataan

Ruang, Departemen Pekerjaan Umum, Edisi 02 (Mei) dan 04 (Juni) 2006, Jakarta.

Dinc, Mustafa, 2002, *Regional and Local Economic Analysis Tools*, The World Bank, Washington, DC

Fan, C.C., and Allen J Scott, 2003, "Industrial Agglomeration and Development: A Survey of Spatial Economic Issues in East Asia and a Statistical Analysis of Chinese Regions", *Economic Geography* 79(3), 2003

Glaeser, E.L, Kallal, H.D, Scheinkman, J.A., Shleifer, A., 1992, Growth in Cities, *The Journal of Political Economy* 100.

Hanson, G.H, 1996, Agglomeration, Disersion, and The Pioneer Firm, *The Journal of Political Economy*, 39.

KADIN, 2007, *Pengembangan KEK Kendal Mentah Lagi*, www.kadinjateng.com dikutip dari www.suaramerdeka.com, Kamis, 20 September 2007 09:42 WIB.

Ottaviano. Gianmarco I.P and Puga, Diego, 1997, *Agglomeration in The Gloal Economy – A Survey of The 'New Economic Geography'*, Centre of Economic Performance, Discussion paper No 356, August 1997.

Rawat, A., 2009, Regional Agglomeration – "New Growth Theory" in The Knowledge – Based Economy: University – Industry Interfacing in The Evolution of High Tech Clustering – Some Evidence From Bangalore, Institute of Business Management & Technology Bangalore, India

Robert-Nicoud, F., 2006, "Agglomeration and Trade With Input-Output Linkages and capital Mobility", *paper for published in Spatial Economic Analysis*

Smith, B. C. 1985. *Decentralization : The Territorial Dimension of the State*. London : George Allen & Unwin.

Wagner, 2000, Regional "Economic Diversity: Action, Concept, or State of Confusion", *The Journal of Regional Analysis and Policy* (2000)30:2

Yuwono, P., 2000, *Perencanaan dan Analisis Kebijakan Pembangunan*, Edisi 1, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga